

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska 2009).
- Ap. Parlindungan. *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. (Bandung :Mandar Madju. 1991)
- Achmad Rubaie . *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. (Malang : Bayumedia, 2007).
- Achmad Algeria Birendra, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Dalam Pendaftaran Tanah* ,(Fakultas Hukum, Universitas Lampung. 2015)
- Bachtiar Effendi. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. (Bandung. Penerbit Alumni. 1993)
- Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, (Bandung: Alumni, 1993),
- Bachsar Mustafa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, (Bandung: Remadja Karya Cv, 1984),
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*, (Jakarta: (Djambatan, 2008),
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*,(jakarta: Djambatan , 2003),
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional*, cetakan ke-5 (Jakarta, Djambatan, 1994)
- Chadidjah Dalimunthe, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya* (Medan: FH USU Press, 2000),
- Dennys Andreas Sutoppo. 2016. *Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah*. Skripsi Universitas Lampung. Bandar

Lampung.

Eddy Ruchiyat. Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UPPA. (Bandung. Armico. 1989)

Eko Yulian Isnur *Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah dan Tanah*, (Yogyakarta: Pustaka Yusticia, 2009).

G. Kartasapoetra. 1986. *Masalah Pertanahan di Indonesia*. (Jakarta. PT. Bina Aksara.1986)

I Gusti Nyoman Guntur. 2014. Pendaftaran Tanah. Yogyakarta. Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Imam Soe tiknjo. *Politik Agraria Nasional*. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 1994).

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. *Hak-hak Atas Tanah*. (Jakarta. Prenada Media.2005)

K. Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982).

Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, Cetakan Kedua*, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2010).

Mudjiono, *Hukum Agraria*, (yogyakarta, liberty,1992)

Philipus M. Hadjon, *wewenang*,(universitas airlangga, 1992.)

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986),

Urip Santoso. *Hukum Agraria & Hak-hak Atass Tanah*. (Jakarta. Kencana Prenada Meida Group. 2005).

Urip Santoso, *Perolehan Hak atas Tanah, cetakan ke-1*, (Jakarta: kencana, 2015)

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua*, (Jakarta : Prenada Media, 2005),

Yunian, *Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di*

Kabupaten Klaten, (Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia) 2017

Jurnal:

Ardiansyah Zulhadji. “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”. *Lex Crimen*. Vol.V/No. a/Aprl-Jun/2016.

Auri. “Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi I. Volume 2. 2014

Erwiningsih, W, “Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*,2009.

Ismail, N, Arah Politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 2012.

Ya'kub, A, Agenda Neoliberal: Menyusup Melalui Kebijakan Agraria di Indonesia, *Jurnal Analisis Sosial*,200.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 84*)

Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*Lembaran Negara No. 104 tahun 1960*)

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Pengelolaan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pdt.G/2016/PN Dps

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 23 / PDT / 2017 / PT DPS

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2174k/Pdt/2017.